

ABSTRAK

Hardiman Mustakim, Nomor induk mahasiswa: 0001.DIH.30.2022, Penelitian yang berjudul “Hakikat Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”. Dibawah bimbingan **Muin Fahmal, La Ode Husen** dan **Nurul Qamar**.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan hakikat fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial di indonesia, Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan penerapan fungsi pengawasan DPR terhadap presiden dan Untuk mengetahui, menganalisis, menemukan dan menjelaskan kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap presiden termasuk upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada disertasi ini adalah penelitian hukum Doktrinal (yuridis-normatif) yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka (*library research*) yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai kaitan terhadap pembahasan masalah sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).

Penerapan fungsi pengawasannya DPR terhadap Presiden dilaksanakan dengan pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan dengan adanya 3 (tiga) hak DPR yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden yang dapat mengakibatkan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya tidak akan melemahkan sistem presidensial. Sebaliknya adanya pengawasan tersebut semata sebagai bentuk perimbangan dan pengawasan terhadap kekuasaan Presiden yang besar, sehingga menghindarkan timbulnya tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian maka fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden memperkuat sistem presidensial.

Rekomendasi, DPR perlu menjaga independensinya dari pengaruh eksekutif dan partai politik. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat aturan yang mengatur konflik kepentingan, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa anggota DPR bebas dari tekanan politik yang dapat memengaruhi fungsi pengawasan mereka.

ABSTRACT

Hardiman Mustakim, Student registration number: 0001.DIH.30.2022, Research entitled "The Nature of the Supervisory Function of the House of Representatives in Efforts to Strengthen the Presidential Government System in Indonesia". Under the guidance of Muin Fahmal, La Ode Husen and Nurul Qamar.

The purpose of this research is to find out, analyze and discover the nature of the supervisory function of the people's representative council in an effort to strengthen the presidential government system in Indonesia. To know, analyze and discover the application of the DPR's supervisory function towards the president. towards the president, including efforts to strengthen the presidential system of government.

The type of research that will be carried out in this dissertation is doctrinal (juridical-normative) legal research, namely legal research carried out by examining library materials (library research) which uses writing study objects in the form of existing libraries, in the form of books, journals. , and regulations that are related to the discussion of the problem so that this writing is also library research.

The implementation of the DPR's supervisory function towards the President is carried out by supervising the implementation of the Law and the APBN. The supervisory function is carried out with the DPR's 3 (three) rights, namely the right to interpellation, the right to inquiry and the right to express an opinion. The DPR's supervisory function over the President which could result in the President's dismissal during his term of office will not weaken the presidential system. On the other hand, this supervision is merely a form of balance and supervision of the President's enormous power, thereby preventing arbitrary actions. In this way, the DPR's supervisory function over the President strengthens the presidential system.

Recommendation, the DPR needs to maintain its independence from the influence of the executive and political parties. This can be done by strengthening rules governing conflicts of interest, increasing transparency in decision making, and ensuring that DPR members are free from political pressure that could affect their oversight function.

